

## **KATEGORI**

Pemerintah

## **SUB KATEGORI**

Pelayanan Publik

## **NAMA INDIKATOR**

Keberadaan E-procurement

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- **E-procurement** atau pengadaan secara elektronik adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

## **RUJUKAN**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Komunikasi Dan Informatika

## **UKURAN**

-

## **UNIT**

Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika

## **KEGUNAAN**

Meningkatkan efisiensi, efektivitas, mutu, dan transparansi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

## **INTERPRETASI**

Melalui E-procurement yang dilakukan oleh pemerintah daerah maka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah akan berjalan secara transparan.

## **KETERANGAN**

- Pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat dilakukan dengan cara:
  1. E-Tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam

waktu yang telah ditentukan.

2. E-Purchasing merupakan tata cara pembelian barang/ jasa melalui sistem katalog elektronik.

• Pengadaan barang/jasa secara elektronik bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

• Implementasi e-Procurement di lingkungan instansi pemerintah memberikan tantangan bagi dunia auditing, dimana dalam proses e-Procurement bisa di katakan penggunaan kertas telah di kurangi. LKPP sebagai pengembang Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) mulai tahun 2009 bekerjasama dengan BPKP untuk mengembangkan e-Audit (modul dalam SPSE) suatu alat bantu auditor yang untuk melakukan audit terhadap paket pengadaan yang dilelangkan melalui LPSE.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Kementrian Komunikasi dan Informasi

## **DOKUMEN**

LPPD

